

**PROYEK FIKTIF PADA PT. DI (BADAN USAHA MILIK NEGARA)  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Grace Victoria**

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.
2. Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Berdasarkan data statistik KPK pada rentang tahun 2017-2021, tindak pidana korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri saja melainkan tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh korporasi dan tindakan tersebut sangat merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi ini tentunya dapat merusak moral publik dan mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap hukum dan peraturan. Seiring dengan perkembangan zaman muncul banyak teori mengenai pertanggungjawaban korporasi untuk menghukum korporasi yang melakukan tindak pidana. Pada perkembangannya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 20 UU TPK. Penjatuhan pidana terhadap korporasi tentunya dapat mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Oleh karena itu Pasal 3 dan Pasal 20 UU TPK mengatur tentang sanksinya sementara Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016 ini menjadi pedoman apa saja kesalahan-kesalahan korporasi yang dapat membuat korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana.

**Kata Kunci:** Tindak pidana korupsi, kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, BUMN, kerugian keuangan negara

**FICTIVE PROJECT AT PT. IN (STATE OWNED ENTERPRISE) BASED  
ON LEGAL REGULATIONS CONCERNING CRIMINAL ACTS OF  
CORRUPTION**

**Grace Victoria**

*Law/Legal Studies*

*Advisors:*

1. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.
2. Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

**ABSTRACT**

*Based on statistical data from the Corruption Eradication Commission over a range of years 2017-2021 range, acts of corruption are not only committed by officials or civil servants, but acts of corruption are also committed by corporations and these actions are very detrimental to state finance. Corruption crimes committed by corporations can certainly undermine public morale and reduce public trust in laws and regulations. Along with the times, many theories emerged regarding corporate responsibility to punish corporations that commit crimes. In its development, acts of corruption committed by corporations are regulated in Article 3 and Article 20 of the Corruption Crime Eradication Law. Criminal imposition of corporations can certainly consider the provisions of Article 4 paragraph (2) Supreme Court Regulation number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. Therefore Article 3 and Article 20 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption regulate sanctions while Article 4 paragraph (2) of the Supreme Court Regulation number 13 of 2016 serves as a guideline for corporate mistakes that can make a corporation held criminally liable.*

**Keywords:** *corruption, corporate crime, corporate criminal responsibility, state-owned enterprises, state financial losses*